

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

BPTP Lampung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr.Drs.Jekvy Hendra ,M.Si
NIP. 196704171994031002

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Pernyataan Tanggung Jawab
- Ringkasan
- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Lain-lain
 - C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.3.2. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr.Drs.Jekvy Hendra ,M.Si
NIP. 196704171994031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Lampung Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp75.343.859,00 atau mencapai 132,89% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp56.698.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp11.155.610.753,00 atau mencapai 96,81% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.523.224.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp144.294.242.595,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp56.400.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp144.196.730.295,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp41.112.300,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp144.294.242.595,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.996.478,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.381.094.880,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-13.315.098.402,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp144.748.381,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-13.170.350.021,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp145.355.471.215,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-13.170.350.021,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.028.854.507,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.080.266.894,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp144.294.242.595,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	56.698.000,00	75.343.859,00	132,89	111.692.680,00
Jumlah Pendapatan		56.698.000,00	75.343.859,00	132,89	111.692.680,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.764.036.000,00	6.480.471.698,00	95,81	6.801.009.971,00
Belanja Barang	B.4.	4.724.188.000,00	4.640.214.055,00	98,22	6.762.038.610,00
Belanja Modal	B.5.	35.000.000,00	34.925.000,00	99,79	820.849.000,00
Jumlah Belanja		11.523.224.000,00	11.155.610.753,00	96,81	14.383.897.581,00

II. NERACA

BPTP LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	56.400.000,00	239.700.000,00
Jumlah Aset Lancar		56.400.000,00	239.700.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	119.368.800.000,00	119.368.800.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14.559.491.294,00	14.447.792.114,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	20.808.069.963,00	21.452.324.963,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4.294.988.889,00	3.104.127.889,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	77.559.400,00	77.559.400,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-14.912.179.251,00	-13.344.751.971,00
Jumlah Aset Tetap		144.196.730.295,00	145.105.852.395,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	482.073.422,00	593.772.602,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-440.961.122,00	-583.853.782,00
Jumlah Aset Lainnya		41.112.300,00	9.918.820,00
Jumlah Aset		144.294.242.595,00	145.355.471.215,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	144.294.242.595,00	145.355.471.215,00
Jumlah Ekuitas		144.294.242.595,00	145.355.471.215,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		144.294.242.595,00	145.355.471.215,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	65.996.478,00	48.618.424,00
JUMLAH PENDAPATAN		65.996.478,00	48.618.424,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.480.471.698,00	6.801.009.971,00
Beban Persediaan	D.3.	1.658.343.476,00	1.956.509.500,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.913.575.047,00	2.364.392.055,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	939.841.401,00	790.867.542,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	447.155.131,00	1.857.707.513,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.941.708.127,00	2.414.402.000,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	-4.564.080,00
JUMLAH BEBAN		13.381.094.880,00	16.180.324.501,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-13.315.098.402,00	-16.131.706.077,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	3.599.999,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	21.975.000,00	114.300.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	370.273.382,00	98.686.456,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	207.150.000,00	2.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		144.748.381,00	-17.613.544,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-13.170.350.021,00	-16.149.319.621,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	145.355.471.215,00	146.730.544.531,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-13.170.350.021,00	-16.149.319.621,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	1.028.854.507,00	-441.629.196,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	0,00	343.425.000,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2.	222.716.329,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3.	418.374.000,00	-821.085.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.4.	387.764.178,00	36.030.804,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11.080.266.894,00	15.215.875.501,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	144.294.242.595,00	145.355.471.215,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Lampung

Institusi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor : 798/Kpts/OT.210/12/94 tanggal 13 Desember 1994.

BPTP merupakan fungsi unit kerja Eselon IIIa yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Pejabat Eselon IV.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

VISI MISI BPTP LAMPUNG

VISI

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem **pertanian bio-industri tropika** berkelanjutan.

MISI

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan *scientific recognition* dan *impact recognition*.

TUJUAN

- Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis *advanced technology* dan *bioscience*, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika iklim.
- Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional.

SASARAN STRATEGIS BALITBANGTAN

- Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan memanfaatkan *advanced technology* dan *bioscience*.
- Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis *bioscience* dan *bioengineering* dengan memanfaatkan *advanced technology*, seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing yang adaptif.
- Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spasial dengan dukungan IT.
- Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

- Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi.
- Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan HKI.

TUGAS POKOK

- Melaksanakan Pengkajian dan Perakitan Teknologi Pertanian Tepat Guna Spesifik Lokasi

FUNGSI

- Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- Penyiapan dan perakitan paket teknologi spesifik lokasi untuk penyusunan materi penyuluhan pertanian;
- Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, penelitian dan perakitan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha & rumah tangga Balai

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	51.000.000,00	51.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	5.698.000,00	5.698.000,00
Jumlah Pendapatan	56.698.000,00	56.698.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.779.126.000,00	6.599.111.000,00
Belanja Lembur	144.910.000,00	164.925.000,00
Belanja Barang Operasional	886.081.000,00	1.038.992.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.752.891.000,00	596.150.000,00
Belanja Barang Persediaan	3.082.637.000,00	1.341.968.000,00
Belanja Jasa	877.000.000,00	356.404.000,00
Belanja Pemeliharaan	902.084.000,00	939.884.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.647.250.000,00	450.790.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.500.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.000.000,00	35.000.000,00
Jumlah Belanja	16.473.479.000,00	11.523.224.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp75.343.859,00 atau mencapai 132,89% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp56.698.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Pengujian ,sertifikasi,Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	0,00	14.259.000,00	0,00

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pertanian , Perkebunan , Pendapatan Pemindahan BMN Lainnya, Pendapatan sewa Gedung / Sewa Rumah Dinas, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	51.000.000,00	16.507.477,00	32,37
Pendapatan Lain-lain	5.698.000,00	5.747.382,00	100,87
Pendapatan Hasil Penelitian / Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	38.830.000,00	0,00
Jumlah	56.698.000,00	75.343.859,00	132,89

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -32,54% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Pengujian ,sertifikasi,Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	14.259.000,00	23.235.000,00	-38,63
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	47.418.520,00	- 100,00
Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pertanian , Perkebunan , Pendapatan Pemindahan BMN Lainnya, Pendapatan sewa Gedung / Sewa Rumah Dinas, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	16.507.477,00	5.423.424,00	204,37
Pendapatan Lain-lain/Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	5.747.382,00	15.655.736,00	-63,29
Pendapatan Hasil Penelitian / Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	38.830.000,00	19.960.000,00	94,54
Jumlah	75.343.859,00	111.692.680,00	-32,54

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp11.155.610.753,00 atau 96,81% dari anggaran belanja sebesar Rp11.523.224.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	6.764.036.000,00	6.481.017.304,00	95,82
Belanja Barang	4.724.188.000,00	4.640.214.055,00	98,22
Belanja Modal	35.000.000,00	34.925.000,00	99,79
Total Belanja Kotor	11.523.224.000,00	11.156.156.359,00	96,81
Pengembalian Belanja		-545.606,00	0,00
Total Belanja	11.523.224.000,00	11.155.610.753,00	96,81

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -22,44% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran Belanja Pegawai lebih kecil dari tahun sebelum yang setiap tahun pegawai berkurang yang disebabkan Pensiun
2. Pagu Anggaran Belanja Barang lebih kecil dari sebelumnya dikarenakan Kegiatan Penelitian dan Pengkajian tidak dilaksanakan disebabkan Pandemi Covid 19
3. Pagu Belanja Modal lebih kecil dan untuk belanja modal tidak ada pembelian hanya Penambahan Halaman Parkir Mobil di Kantor Hajimena

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	6.480.471.698,00	6.801.009.971,00	-4,71
Belanja Barang	4.640.214.055,00	6.762.038.610,00	-31,38
Belanja Modal	34.925.000,00	820.849.000,00	-95,75
Total Belanja	11.155.610.753,00	14.383.897.581,00	-22,44

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.480.471.698,00 dan Rp6.801.009.971,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar - 4,71% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pegawai setiap tahun pensiun dan Pagu belanja pegawai lebih kecil dan pada tahun 2020 Pegawai yang Pensiun sebanyak 5 Orang

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.316.110.304,00	6.656.955.387,00	-5,12
Belanja Lembur	164.907.000,00	144.800.000,00	13,89
Jumlah Belanja Kotor	6.481.017.304,00	6.801.755.387,00	-4,72
Pengembalian Belanja Pegawai	-545.606,00	-745.416,00	-26,81
Jumlah Belanja	6.480.471.698,00	6.801.009.971,00	-4,71

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.640.214.055,00 dan Rp6.762.038.610,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -31,38% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Pagu Anggaran belanja barang lebih kecil dari tahun sebelumnya dan ada pemotongan anggaran melalui Refocusing dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian akibat adanya Pandemi Covid -19 sehingga kegiatan Penelitian Pengkajian tidak berjalan sesuai perencanaan

Tabel Belanja Covid-19

Satker	Kd.Keg	Kd.Output	Akun	N.Akun	Revisi Dipa	Belanja	Sisa	Penggunaan .Bel SE.DJPB.0369.2020
567517	018.09.12	1809.002.A	521311	B.Brg.Operasi oanal Penanganan Covid-19	156.161.000	156.161.000	-	Madu,Vitamin,Penambah daya tahan tubuh untuk Pegawai,dan Perakitan Bilik Disinpektan
567517	018.09.12	1809.002.A	521841	Bel.Brg Persediaan-Pandemi Covid-19	246.785.000	246.030.800	174.200	Brg.Persediaan kantor berupa: masker,Face Shield,Gun Thermometer,Hend sanitizer,Disinpektan,Persediaan berbahan dasar Eucalyptus, dan bahan pendukung Sanitasi lainnya
567517	018.09.12	1809.002.A	522192	Bel.Jasa-Penanganan Covid-19	79.254.000	78.600.000	654.0000	Ravid Tes antibodi,Ravid Tes Anti Gen danTES PCR
567517	018.09.12	1809.002.A	523114	Bel.Pemeliharaan Gedung Bangunan-Penanganan Covid-19	37.800.000	37.800.000	0	Pembuatan 14 Unit Alat Pencuci tangan
Total					520.000.000	518.591.800	1.408.200	

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.038.990.772,00	717.839.600,00	44,74
Belanja Barang Non Operasional	595.152.000,00	1.164.215.000,00	-48,88
Belanja Barang Persediaan	1.339.642.476,00	1.749.831.500,00	-23,44
Belanja Jasa	279.432.275,00	482.337.455,00	-42,07
Belanja Pemeliharaan	939.841.401,00	790.107.542,00	18,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	447.155.131,00	1.857.707.513,00	-75,93
Jumlah Belanja Kotor	4.640.214.055,00	6.762.038.610,00	-31,38
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.640.214.055,00	6.762.038.610,00	-31,38

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp34.925.000,00 dan Rp820.849.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -95,75% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Pagu Belanja Modal lebih kecil dan untuk belanja modal tidak ada pembelian hanya Penambahan Halaman Parkir Mobil di Kantor BPTP Hajimena

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	363.704.000,00	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.925.000,00	457.145.000,00	-92,36
Jumlah Belanja Kotor	34.925.000,00	820.849.000,00	-95,75
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	34.925.000,00	820.849.000,00	-95,75

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp34.925.000,00 dan Rp457.145.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -92,36% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

- Pada tahun 2020 Penambahan Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan penambahan tempat parkir dan Canovi Kantor BPTP Hajimena

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.925.000,00	457.145.000,00	-92,36
Jumlah Belanja Kotor	34.925.000,00	457.145.000,00	-92,36
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	34.925.000,00	457.145.000,00	-92,36

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.400.000,00 dan Rp239.700.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bahan Baku	56.400.000,00	10.575.000,00
Persediaan Lainnya	0,00	229.125.000,00
Jumlah	56.400.000,00	239.700.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp119.368.800.000,00 dan Rp119.368.800.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.559.491.294,00 dan Rp14.447.792.114,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	14.447.792.114,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	1.574.476.782,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	149.499.180,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-37.800.000,00

Reklasifikasi Keluar	-1.574.476.782,00
Saldo per 31 Desember 2020	14.559.491.294,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-11.849.228.926,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.710.262.368,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Tahun 2020 tidak ada Penambahan Peralatan dan Mesin
2. Mutasi Pengurangan disebabkan penghentian barang-barang yg sudah rusak dan tidak terpakai

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.808.069.963,00 dan Rp21.452.324.963,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	21.452.324.963,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	3.779.153.722,00
Pengembangan Nilai Aset	34.925.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	-19.009.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	-753.478.000,00
Reklasifikasi Keluar	-3.775.233.722,00
Saldo per 31 Desember 2020	20.808.069.963,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-2.202.247.679,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	18.605.822.284,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.34.925.000
Yaitu berupa pengembangan penambahan Canovi tempat parkir mobil Kantor BPTP Hajimena
2. Mutasi pengurangan Perubahan Nilai Gedung/Penyusutan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.294.988.889,00 dan Rp3.104.127.889,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3.104.127.889,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Kesalahan input IP	1.190.861.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	4.294.988.889,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-860.702.646,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.434.286.243,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp77.559.400,00 dan Rp77.559.400,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-14.912.179.251,00 dan Rp-13.344.751.971,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.559.491.294,00	-11.849.228.926,00	2.710.262.368,00
2.	Gedung dan Bangunan	20.808.069.963,00	-2.202.247.679,00	18.605.822.284,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.294.988.889,00	-860.702.646,00	3.434.286.243,00
4.	Aset Tetap Lainnya	77.559.400,00	0,00	77.559.400,00
Akumulasi Penyusutan		39.740.109.546,00	-14.912.179.251,00	24.827.930.295,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp482.073.422,00 dan Rp593.772.602,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Lampung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	593.772.602,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	37.800.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-149.499.180,00
Saldo per 31 Desember 2020	482.073.422,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-428.476.602,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	53.596.820,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. **Pengurangan Aset Tetap Lainnya yaitu Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa : Buku Perpustakaan**

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-440.961.122,00 dan Rp-583.853.782,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	482.073.422,00	-428.476.602,00	53.596.820,00
Akumulasi Penyusutan		482.073.422,00	-440.961.122,00	41.112.300,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp144.294.242.595,00 dan Rp145.355.471.215,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp65.996.478,00 dan Rp48.618.424,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	38.830.000,00	19.960.000,00	94,54
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	750.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	14.259.000,00	23.235.000,00	-38,63
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	7.212.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.945.478,00	5.423.424,00	-8,81
Jumlah	65.996.478,00	48.618.424,00	35,74

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi ditahun 2020 mengalami kenaikan disebabkan thn 2019 tidak ada Realisasi

- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya pada tahun 2020 Realisasi mengalami penurunan sebesar -38,63 % disebabkan Pengujian dari Pihak Swasta dan Perorangan berkurang .

- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budiaya Realisasi pada tahun 2020 tidak ada perubahan dikarenakan jadwal tanam mundur disebabkan kemarau curah hujan sedikit khusus tanaman padi telah ditetapkan petani untuk menanam padi kegiatan produksi benih sumber padi beberapa kali pindah lokasi tanam, karena lahannya yang sudah dijadwalkan dapat giliran air irigasi ternyata tidak dapat giliran sedangkan kegiatan produksi benih sumber kedelai 2 Ha gagal total karena tanaman kekurangan air (kemarau)

- Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berasal dari Sewa rumah Dinas setoran melalui Potongan SPM Gaji

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.480.471.698,00 dan Rp6.801.009.971,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.007.200.880,00	4.303.481.780,00	-6,88
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.510,00	60.105,00	-14,30
Beban Tunj. Anak PNS	86.633.142,00	88.740.460,00	-2,37
Beban Tunj. Beras PNS	198.285.960,00	209.511.060,00	-5,36
Beban Tunj. Fungsional PNS	916.290.000,00	972.350.000,00	-5,77
Beban Tunj. PPh PNS	53.518.646,00	65.194.686,00	-17,91
Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	286.068.560,00	300.856.030,00	-4,92
Beban Tunjangan Umum PNS	78.200.000,00	92.190.000,00	-15,18
Beban Uang Lembur	164.907.000,00	144.800.000,00	13,89
Beban Uang Makan PNS	656.556.000,00	591.065.850,00	11,08
Jumlah	6.480.471.698,00	6.801.009.971,00	-4,71

- . Belanja Pegawai Mengalami Penurunan sebesar -6,88 % dikarenakan jumlah pegawai berkurang setiap tahun Pegawai Pensiun dan tahun 2020 pegawai yang pensiun sebanyak 5 orang
- Uang makan mengalami kenaikan sebesar 12,48 tahun 2020 disebabkan Pegawai yg Study sudah mulai aktif kembali dan tidak ada kegiatan Perjalanan Dinas dikarenakan COVID - 19

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.658.343.476,00 dan Rp1.956.509.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil

produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	571.111.800,00	187.260.000,00	204,98
Beban Persediaan konsumsi	1.087.231.676,00	1.769.249.500,00	-38,55
Jumlah	1.658.343.476,00	1.956.509.500,00	-15,24

- Beban Persediaan konsumsi yang terdiri dari Bahan ATK, fotocopy, saprodi dan bahan-bahan kebutuhan Covid -19

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.913.575.047,00 dan Rp2.364.392.055,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	190.740.000,00	418.017.000,00	-54,37
Beban Barang Non Operasional Lainnya	380.412.000,00	647.748.000,00	-41,27
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	156.161.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	193.560.000,00	178.960.000,00	8,16
Beban Honor Output Kegiatan	24.000.000,00	98.450.000,00	-75,62
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	78.600.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	30.350.000,00	182.885.000,00	-83,40
Beban Keperluan Perkantoran	667.970.071,00	538.879.600,00	23,96
Beban Langganan Listrik	156.803.121,00	181.853.291,00	-13,77
Beban Langganan Telepon	4.679.154,00	3.609.164,00	29,65
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	21.299.701,00	0,00	0,00
Beban Sewa	9.000.000,00	113.990.000,00	-92,10

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Jumlah	1.913.575.047,00	2.364.392.055,00	-19,07

- Realisasi beban barang dan Jasa pada tahun 2020 sebesar 19,07 % mengalami penurunan disebabkan Pagu Anggaran lebih kecil yang disebabkan adanya wabah Pandemi Covid -19

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp939.841.401,00 dan Rp790.867.542,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.157.800,00	101.708.000,00	23,06
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	37.800.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27.000.000,00	18.357.000,00	47,08
Beban Pemeliharaan Jaringan	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	160.500.000,00	113.750.000,00	41,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	569.933.601,00	536.842.542,00	6,16
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	760.000,00	-100,00
Jumlah	939.841.401,00	790.867.542,00	18,84

- Beban pemeliharaan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,84 dikarenakan ada beban pemeliharaan gedung dan bangunan untuk penanganan Pandemi Covid- 19

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp447.155.131,00 dan Rp1.857.707.513,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	397.753.331,00	1.566.813.930,00	-74,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	21.000.000,00	-88,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.150.000,00	142.420.000,00	-86,55
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.851.800,00	127.473.583,00	-78,15
Jumlah	447.155.131,00	1.857.707.513,00	-75,93

- Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -75,93 % dikarenakan kegiatan Penelitian Pengkajian kelapangan tidak dilaksanakan akibat wabah Pandemi Covid - 19

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.941.708.127,00 dan Rp2.414.402.000,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	637.500,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	641.496.334,00	847.713.353,00	-24,33
Beban Penyusutan Irigasi	59.047.822,00	28.595.788,00	106,49
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77.468.457,00	70.527.832,00	9,84

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Jaringan	74.018.037,00	74.018.036,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.206.520,00	2.065.196,00	-41,58
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.088.470.957,00	1.390.844.295,00	-21,74
Jumlah	1.941.708.127,00	2.414.402.000,00	-19,58

Beban Penyusutan dan Amortasi mengalami penurunan sebesar -19,58 disebabkan setiap tahun ada penyusutan/berkurang karna barang yang sudah rusak/tidak terpakai

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-4.564.080,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-4.564.080,00	-100,00
Jumlah	0,00	-4.564.080,00	-100,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tahun 2020 tidak ada dikarenakan sudah dilunasi pada tahun 2019

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-21.975.000,00	-114.300.000,00	-80,77
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-207.150.000,00	-2.000.000,00	10.257,50
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0,00	1.777.720,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	70.678.000,00	-100,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	364.526.000,00	10.575.000,00	3.347,05
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.599.999,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	4.253.020,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.747.382,00	11.402.716,00	-49,60
Jumlah	144.748.381,00	-17.613.544,00	-921,80

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp145.355.471.215,00 dan Rp146.730.544.531,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-13.170.350.021,00 dan Rp-16.149.319.621,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.028.854.507,00 dan Rp-441.629.196,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp343.425.000,00.

E.3.2. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp222.716.329,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp418.374.000,00 dan Rp-821.085.000,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	-772.487.000,00
Jalan dan Jembatan	55.525.000,00
Irigasi	1.135.336.000,00
Jumlah	418.374.000,00

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp387.764.178,00 dan Rp36.030.804,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	481.245.826,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-76.130.085,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-17.351.563,00
Jumlah	387.764.178,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.080.266.894,00 dan Rp15.215.875.501,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.155.610.753,00
Diterima dari Entitas Lain	-75.343.859,00
Jumlah	11.080.266.894,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-75.343.859,00 sedangkan DKEL sebesar Rp11.155.610.753,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp144.294.242.595,00 dan Rp145.355.471.215,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Rekening Bendahara tahun 2020 telah berubah menjadi Nama Rekening (BPG 017 BPTP Lampung)

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- BPTP Lampung mendapat Anggaran DIPA 018.09.02.567517/2020 tgl 12 Desember 2019 pagu sebesar Rp.16.473.479.000 ,Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung mengalami Revisi DIPA sebanyak 4 kali
- Revisi ke I No.DIPA 018.09.2 .567517/2020 tanggal 22-06-2020 Pagu DIPA menjadi Rp.11.145.825.000 yaitu penambahan anggaran dengan adanya Penambahan Keg. Toga dan KUB Strata 1, pengurangan anggaran beberapa Kegiatan diseminasi dan Revisi POK beberapa kegiatan
- Revisi ke II No.DIPA 018.09.2 .567517/2020 tanggal 04-09-2020 Pagu DIPA menjadi Rp.11.215.825.000,- yaitu Refocusing anggaran berupa pengurangan Seluruh anggaran kegiatan dan pembatalan kegiatan Pemetaan Singkronisasi, Toga Dan KUB Strata 1
- Revisi ke III No.DIPA 018.09.2 .567517/2020 tanggal 26-10-2020 Pagu DIPA menjadi Rp.11.523.224.000,- yaitu Penambahan kembali kegiatan Singkronisasi, dan perubahan anggaran UPSUS,UPBS padi dan penambahan Anggaran Rapid Tes penanggulangan Covid - 19
- Revisi ke IV No.DIPA 018.09.2 .567517/2020 tanggal 11-11-2020 Pagu DIPA menjadi Rp.11.523.224.000,-yaitu Penambahan anggaran Covid – 19 dan Pengurangan Target PNBPN. Dan Revisi POK Hal III DIPA perbaikan Pagu Minus Anggaran belanja pegawai

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung pada tanggal 14 Desember 2020 penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Drs.Jekvy Hendra, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen : Asropi S.TP

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Drs. Dani Purwadi

Bendahara : Yulis Aisyah

Tabel Belanja Covid-19

Satker	Kd.Keg	Kd.Output	Akun	N.Akun	Revisi Dipa	Belanja	Sisa	Penggunaan .Bel SE.DJPB.0369.2020
567517	018.09.12	1809.002.A	521311	B.Brg.Operasi oanal Penanganan Covid-19	156.161.000	156.161.000	-	Madu,Vitamin,Penambah daya tahan tubuh untuk Pegawai,dan Perakitan Bilik Disinpektan
567517	018.09.12	1809.002.A	521841	Bel.Brg Persediaan-Pandemi Covid-19	246.785.000	246.030.800	174.200	Brg.Persediaan kantor berupa: masker,Face Shield,Gun Thermometer,Hend sanitizer,Disinpektan,Persediaan berbahan dasar Eucalyptus, dan bahan pendukung Sanitasi lainnya
567517	018.09.12	1809.002.A	522192	Bel.Jasa-Penanganan Covid-19	79.254.000	78.600.000	654.0000	Ravid Tes antibodi,Ravid Tes Anti Gen danTES PCR
567517	018.09.12	1809.002.A	523114	Bel.Pemeliharaan Gedung Bangunan-Penanganan Covid-19	37.800.000	37.800.000	0	Pembuatan 14 Unit Alat Pencuci tangan
Total					520.000.000	518.591.800	1.408.200	

